

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai penerapan prosedur belanja pegawai pada BPOM maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Prosedur belanja pegawai di BPOM sudah memiliki struktur organisasi dengan pembagian kewenangan yang jelas sesuai ketentuan dari pemerintah dan perundang-undangan sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam prosedur tersebut. Klasifikasi, penyajian dan pengungkapan belanja pegawai di BPOM sudah sesuai PP No. 71 tahun 2010.
2. Penerapan prosedur gaji pokok, tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Buku Petunjuk Penggunaan Anggaran BPOM serta Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 per 29 Nopember 2012. Kendala-kendala yang sering terjadi pada penerapan prosedur ini dikarenakan tidak lengkapnya dokumen yang diserahkan kepada PPABP.
3. Kendala-kendala yang ada tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pegawai. Penyerapan belanja pegawai sudah cukup baik namun

realisasi seringkali melampaui anggaran atau *defisit* dikarenakan jumlah pegawai yang diterima pada tahun anggaran tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang keluar.

B. Saran

1. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti dapat benar-benar memahami tentang akuntansi sector publik serta peneliti juga diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi Instansi Pemerintah

- a. Instansi pemerintah bisa melakukan penganggaran dengan lebih baik. Anggaran gaji pokok yang sering defisit dikarenakan jumlah pegawai yang diterima melewati perkiraan bisa dibuatkan jumlah pegawai yang akan diterima pada tahun berikutnya sehingga anggaran tidak terlalu jauh dengan realisasi.
- b. Untuk kendala seperti dokumen yang sering terlambat yang mengakibatkan terlambatnya PPABP dalam melakukan proses pengolahan data karena kurangnya kerjasama antara bagian penggajian dengan bagian pengembangan pegawai. Diharapkan di masa mendatang hal-hal tersebut bisa diatasi dengan baik.